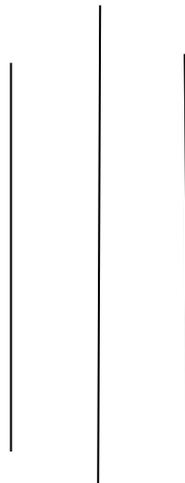




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2022-2023
KE KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 07 – 11 AGUSTUS 2023**



KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan.....	3
I.3. Lokasi dan Waktu.....	4
I.4. Agenda Kunjungan.....	4
II. HASIL PERTEMUAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN.....	5
II.1. Gambaran Umum.....	5
II.2. Temuan, Permasalahan dan Usulan	6
II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
III. PENUTUP.....	9
LAMPIRAN.....	10
Dokumentasi Kegiatan	100



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
KE KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 07 – 11 AGUSTUS 2023
=====**

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 16 Mei 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Bontang;
- b. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi;
- c. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya melalui APBN.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 tanggal 07–11 Agustus 2023, yang dipimpin oleh **Bapak Lasarus, S.Sos., M.Si (A-242/F-PDIP/DAPIL KALBAR II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut terkait penerapan regulasi pengoperasian pelabuhan terminal khusus di wilayah Kalimantan Timur;
2. Peninjauan Jalan Urip Sumohardjo dan usulan rencana penurunan jalan di depan RSUD Taman Husada Kota Bontang;
3. Peninjauan Pelabuhan Tanjung Laut terkait pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan;
4. Pertemuan dengan Walikota Bontang (Pemerintah Kota Bontang) dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI membahas terkait usulan, program dan kebutuhan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peninjauan Kampung Nelayan Selambai terkait kelanjutan pembangunan dan penataan kawasan kumuh.

II. HASIL PERTEMUAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Gambaran Umum

- Salah satu isu strategis di Provinsi Kalimantan Timur terkait infrastruktur transportasi Laut adalah pengelolaan dan pengoperasian terminal khusus (tersus), di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini, khususnya terkait ijin pandu tunda dan macam-macam kegiatan yang belum sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi tidak maksimalnya penerimaan negara yaitu Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Beberapa pihak yang memiliki terminal khusus belum mau bekerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pandu tunda. Bila pemilik tersus tidak dapat melaksanakan aturan pandu tunda yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, maka pemerintah punya kewenangan (untuk meminta) kapal tersebut tidak dapat melakukan kegiatan berlayar atau kegiatan lain di tersus tersebut.
- Akibat ketidaktegasan penegakan regulasi ini, terkait izin pandu tunda menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal yaitu
 - 1) Penyelenggara Pemanduan adalah OP/KSOP/UPP, namun dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Pengelola Terminal khusus (Tersus).
 - 2) BUP/Pengelola Tersus yang mendapatkan pelimpahan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - 3) Pelimpahan kewenangan pemanduan hanya dapat diberikan kepada BUP/Tersus yang memenuhi persyaratan sesuai Permenhub Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.
- Penanganan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala turut menjadi prioritas kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Penanganan banjir rob di Bontang Kuala ini perlu kajian teknis yang lebih mendalam, mengingat banjir rob tidak bisa dilakukan hanya dengan peningkatan jalan dan pembuatan pagar keliling untuk membendung air masuk, karena banjir siklus air pasang laut ini kian waktu akan terus meningkat dikarenakan kondisi alam. Perlu diketahui bersama bahwa bukan hanya jalan

nasionalnya dan tanggulnya, akan tetapi perlunya juga melihat limpahan dari air laut, bila ditutup tanggul jalan tetapi dari celah lain bisa masuk air dan banjir rob tetap terjadi. Hal ini juga menjadi perhatian bersama agar permasalahan banjir rob ini dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas.

- Perbaiki jalan nasional di sejumlah titik jalan nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu progres perbaikan jalan, kegiatan pelaksanaan jalan dilakukan bertahap, pembenahan saluran, perbaikan fondasi jalan, teras bahu jalan, dan perlengkapan jalan lainnya. selain perbaikan dan memuluskan jalan, kegiatan lainnya yaitu membenahi saluran drainase yang disebut jadi biang kerok rusaknya jalan di kawasan ini dan juga adanya kendaraan-kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) yang melintasi jalan nasional ini.
- Kelanjutan penataan kawasan kumuh di Kampung Selambai, Bontang, Kalimantan Timur untuk terus menekan tingkat kekumuhan di kawasan tersebut. Tujuannya yaitu menurunkan tingkat kekumuhannya, penyelesaian sanitasi masyarakat yang baik dan bebas stunting;

II.2. Hasil Pertemuan dan Usulan

a. Bidang PUPR

- Ditjen Sumber Daya Air

Penanganan banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala turut menjadi prioritas kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Prioritas perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala dari segi penganggaran guna mendorong percepatan penanganan banjir rob di Bontang Kuala.

Penanganan banjir rob di Bontang Kuala ini perlu kajian yang lebih mendalam mengingat banjir rob tidak bisa dilakukan hanya dengan peningkatan jalan dan pembuatan pagar keliling untuk membendung air masuk. Sebab banjir siklus air pasang laut ini kian waktu akan terus meningkat karena kondisi alam. Penanganan banjir rob di Bontang Kuala ini agar bisa segera direalisasikan minimal paling lambat tahun 2024 sudah bisa dilakukan penanganan.

Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Regional Kalimantan Timur telah menerima hasil review desain pagar keliling pembendung banjir rob agar tak

merendam akses masuk Bontang Kuala. Pihaknya juga menyarankan Pemkot Bontang untuk melakukan penanganan awal dengan cara perbaikan trotoar sisi kanan dan kiri. Tujuannya, agar aktivitas masyarakat tetap berjalan., sehingga sewaktu air pasang aktivitas masyarakat tetap berjalan

- Ditjen Perumahan

Progres pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya:

- 1) Alokasi Revisi DIPA Ke-11 (25 Juli) : 2.050 unit
- 2) Alokasi SK Dirjen Perumahan : 2.000 unit
- 3) Realisasi SK Dirjen (SK CPB) : 1.850 unit
- 4) SK Penetapan CPB:
 - SK Dirjen Timur Tahap I (Reguler) : 1.031 unit
 - SK Dirjen Tahap II (Reguler) : 601 unit
 - SK Dirjen Tahap I (PKE) : 51 unit
 - SK Dirjen Tahap X : 167 unit
 - Total SK Penetapan CPB: 1.850 unit
- 5) BA Hasil Verifikasi CPB: 2.000 unit (100%)
- 6) Minus Alokasi CPB (SK.Tahap III) 150 unit (7,50%)
- 7) Sebaran Lokasi : 10 Kab /Kota : 53 Kecamatan : 110 Desa/Kelurahan
- 8) Capaian Progres Fisik : 83,30%

- Ditjen Bina Marga

Terkait kondisi jalan nasional di Kota Bontang yang perlu penanganan khusus yaitu rencana penanganan jalan nasional di depan RSUD Taman Husada Kota Bontang, Kalimantan Timur. Penanganan jalan nasional di Bontang itu untuk penurunan grade jalan yang terjal. Sebab dinilai, kondisi jalan tersebut memiliki resiko kerawanan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang cukup tinggi. Permasalahan tanjakan di depan RSUD Bontang menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pengguna jalan, grade jalan nasional yang terjal ini akan diturun sedalam 10 meter. Sementara ini kajian *Detail Engineering Design* (DED) telah disusun tahun ini (2023) dan di tahun depan (2024) baru bisa dilakukan pengerjaannya.

b. Bidang Perhubungan

- Ditjen Perhubungan Laut

- 1) Komisi V DPR RI Lasarus meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, untuk menindak tegas oknum pejabat yang diduga tidak menjalankan regulasi dengan baik terkait izin pandu tunda di Kalimantan Timur, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di daerah tersebut.
- 2) Perlu dilakukan enegasan penerapan ijin pandu tunda dan macam-macam kegiatannya yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menghasilkan peningkatan pendapatan buat negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 3) Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menertibkan tersus-tersus baru sehingga tarsus tersebut bisa menjalankan ketentuan yang berlaku serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga bisa meningkatkan capaian PNBP tahun 2023.

II.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Komisi V DPR RI mendukung penuh pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan penegasan pemenuhan regulasi pelaksanaan terkait pengelolaan dan pengoperasian terminal khusus khususnya izin pandu tunda di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Komisi V DPR RI meminta mitra Komisi V DPR RI agar meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Bontang terkait pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi, pengentasan daerah tertinggal, diseminasi informasi, serta kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai dengan kebutuhan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

4. Terkait sejumlah usulan dari Pemerintah Kota Bontang yang disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI yang memberikan *output* dan *outcome* yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 07 – 11 Agustus 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

KETUA TIM

LASARUS, S.SOS, M.Si
A-242

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan

































